

Perbedaan Akses Fasilitas Sekolah di Berbagai Provinsi di Indonesia: Analisis Ketimpangan Berdasarkan Data Potensi Desa (PODES) 2024

Eko Bagus Santoso¹, Agnesia Mensa Sem²

Program Studi Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan
Surabaya, Indonesia

Corresponding Author Email: 23010005@stikosa-aws.ac.id

Abstract

Educational inequality remains one of the major challenges in achieving equitable educational development in Indonesia. Unequal distribution of educational facilities among provinces has contributed to disparities in access to quality education, particularly between western and eastern regions. This study aims to analyze disparities in access to educational facilities from elementary schools to higher education institutions across Indonesian provinces using the 2024 Village Potential Statistics (PODES) dataset. A quantitative descriptive approach was employed using descriptive statistical analysis and the Gini Index to measure the level of inequality in the distribution of educational facilities. The findings indicate substantial disparities across educational levels. East Java recorded the highest number of villages with elementary school facilities, while DKI Jakarta had the fewest. Inequality becomes more pronounced at the higher education level, where West Java has the widest access, whereas Papua records the lowest number of villages with higher education facilities. The Gini Index increased progressively from 0.35 at the elementary level to 0.68 at the higher education level, indicating a transition from low to very high inequality. These findings emphasize the urgency of implementing evidence-based affirmative policies to improve the equitable distribution of educational infrastructure and ensure equal educational opportunities throughout Indonesia.

Keywords: educational inequality; educational facilities; PODES 2024; Gini Index; regional disparity

Abstrak

Ketimpangan pendidikan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia. Distribusi fasilitas pendidikan yang belum merata antardaerah menyebabkan perbedaan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, terutama antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketimpangan akses fasilitas pendidikan mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan data Potensi Desa (PODES) Tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif serta pengukuran Indeks Gini untuk mengidentifikasi tingkat ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada setiap jenjang pendidikan. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah desa dengan fasilitas Sekolah Dasar

terbanyak, sedangkan DKI Jakarta memiliki jumlah paling sedikit. Pada jenjang Perguruan Tinggi, ketimpangan semakin tinggi dengan Jawa Barat memiliki akses terbanyak, sementara Papua menjadi provinsi dengan akses terendah. Nilai Indeks Gini meningkat dari 0,35 pada jenjang Sekolah Dasar menjadi 0,68 pada jenjang Perguruan Tinggi, yang menunjukkan peningkatan ketimpangan dari kategori rendah menjadi sangat tinggi. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan afirmatif berbasis data guna mewujudkan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Kata kunci: ketimpangan pendidikan; fasilitas pendidikan; PODES 2024; Indeks Gini; disparitas wilayah

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjadi salah satu indikator utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat daya saing bangsa. Namun demikian, hingga saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan besar berupa ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan antarwilayah. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan karakteristik wilayah yang sangat beragam menyebabkan penyediaan infrastruktur pendidikan belum dapat menjangkau seluruh daerah secara merata.

Data Potensi Desa (PODES) Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas pendidikan berbeda secara signifikan antarprovinsi. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Provinsi Jawa Timur memiliki lebih dari 8.400 desa yang telah dilengkapi fasilitas pendidikan dasar, sedangkan DKI Jakarta hanya memiliki sekitar 264 desa atau kelurahan dengan fasilitas serupa. Ketimpangan tersebut semakin terlihat pada jenjang pendidikan tinggi, di mana Jawa Barat memiliki akses perguruan tinggi yang jauh lebih besar dibandingkan Papua yang hanya memiliki sejumlah kecil desa dengan fasilitas pendidikan tinggi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan pendidikan masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Ketimpangan akses pendidikan tidak hanya berkaitan dengan jumlah fasilitas yang tersedia, tetapi juga berdampak terhadap kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan yang berkualitas. Keterbatasan akses pendidikan menyebabkan rendahnya angka partisipasi sekolah, tingginya angka putus sekolah, terbatasnya kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan ekonomi dan sosial antarwilayah di Indonesia.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas ketimpangan pendidikan di Indonesia. Rokhman (2018) menjelaskan bahwa karakteristik geografis Indonesia menjadi salah satu faktor utama penyebab tidak meratanya pembangunan fasilitas pendidikan. Susanti (2020) menemukan bahwa daerah dengan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap cenderung memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang memiliki keterbatasan akses pendidikan. Sementara itu, Tilak (2018) menyatakan bahwa ketimpangan akses terhadap pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, berpotensi memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi karena kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengkaji ketimpangan pendidikan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada hubungan antara pendidikan dengan pembangunan manusia, kualitas pendidikan, atau indikator ekonomi. Penelitian yang secara khusus menganalisis distribusi fasilitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan menggunakan Data Potensi Desa (PODES) 2024, yang merupakan data nasional terbaru, masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan antarprovinsi menggunakan Indeks Gini sebagai indikator kuantitatif sehingga dapat menggambarkan tingkat pemerataan secara lebih objektif.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut (*research gap*), penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis komprehensif terhadap distribusi fasilitas pendidikan mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi pada seluruh provinsi di Indonesia dengan memanfaatkan data PODES Tahun 2024. Penelitian ini juga mengintegrasikan analisis statistik deskriptif dengan pengukuran Indeks Gini untuk mengidentifikasi tingkat ketimpangan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan serta menginterpretasikan hasilnya melalui perspektif keadilan distributif dan pemerataan pembangunan.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi pemerataan fasilitas pendidikan di Indonesia serta menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan afirmatif yang lebih tepat sasaran. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi pembangunan dan kebijakan publik, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pemerataan pendidikan berbasis data nasional.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Ketimpangan Akses Pendidikan

Pemerataan akses pendidikan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan mobilitas sosial, dan memperkuat daya saing suatu negara. Oleh karena itu, distribusi fasilitas pendidikan yang merata menjadi prasyarat penting dalam menciptakan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh masyarakat.

Ketimpangan akses pendidikan terjadi ketika masyarakat pada wilayah tertentu memiliki kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang berbeda dibandingkan wilayah lainnya. Ketimpangan tersebut dapat berupa perbedaan jumlah sekolah, keterjangkauan lokasi pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik, kualitas sarana dan prasarana, maupun akses terhadap pendidikan tinggi. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan kualitas pendidikan yang diterima masyarakat sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan pembangunan daerah.

Menurut Tilak (2018), ketimpangan pendidikan merupakan salah satu bentuk ketimpangan sosial yang paling berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi karena pendidikan menjadi faktor utama dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Semakin rendah akses masyarakat terhadap pendidikan, semakin kecil peluang masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh sebab itu, pemerataan fasilitas pendidikan menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Di Indonesia, tantangan pemerataan pendidikan semakin kompleks karena kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Wilayah dengan karakteristik pegunungan, kepulauan kecil, dan daerah perbatasan sering mengalami keterbatasan pembangunan infrastruktur pendidikan. Akibatnya, distribusi sekolah maupun perguruan tinggi lebih terkonsentrasi di wilayah yang memiliki tingkat pembangunan ekonomi lebih tinggi, khususnya Pulau Jawa.

2.2 Teori Keadilan Distributif (*Distributive Justice Theory*)

Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan Distributif yang dikemukakan oleh John Rawls (1971) sebagai landasan utama dalam menganalisis ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan di Indonesia.

Rawls menyatakan bahwa keadilan sosial harus diwujudkan melalui distribusi sumber daya yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kelompok yang paling kurang beruntung (*difference principle*). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan wilayah yang telah maju, tetapi juga memberikan prioritas kepada daerah yang masih tertinggal.

Dalam konteks pendidikan, teori ini menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan harus memperhatikan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Distribusi sekolah dan perguruan tinggi yang hanya terpusat di wilayah tertentu bertentangan dengan prinsip keadilan distributif karena tidak memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat.

Melalui perspektif Rawls, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya diukur dari banyaknya fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana fasilitas tersebut mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses pendidikan.

2.3 Educational Inequality

Konsep *educational inequality* menjelaskan bahwa ketimpangan pendidikan muncul akibat adanya perbedaan akses terhadap sumber daya pendidikan, baik dalam bentuk fasilitas fisik maupun kualitas layanan pendidikan.

Menurut OECD (2022), ketimpangan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- kondisi ekonomi masyarakat;
- letak geografis;
- kebijakan pemerintah;
- kualitas infrastruktur;
- distribusi tenaga pendidik.

Apabila ketimpangan tersebut berlangsung dalam jangka panjang, maka akan menghasilkan kesenjangan kualitas sumber daya manusia antarwilayah.

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan pendidikan masih banyak ditemukan pada daerah-daerah luar Pulau Jawa. Keterbatasan jumlah sekolah, perguruan tinggi, tenaga pendidik, serta sarana pendukung pembelajaran menyebabkan masyarakat memiliki peluang yang berbeda dalam memperoleh pendidikan berkualitas.

Oleh karena itu, pengukuran distribusi fasilitas pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan pendidikan nasional.

2.4 Digital Divide Theory

Selain ketimpangan fasilitas fisik, perkembangan teknologi juga memunculkan bentuk ketimpangan baru yang dikenal sebagai *Digital Divide*.

Van Dijk (2020) menjelaskan bahwa kesenjangan digital tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat dalam mengakses, memanfaatkan, dan memperoleh manfaat dari teknologi informasi.

Wilayah yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan umumnya juga mengalami keterbatasan akses internet, perangkat digital, dan literasi teknologi. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mengalami *double exclusion*, yaitu terhambat memperoleh pendidikan secara konvensional sekaligus tidak mampu memanfaatkan pendidikan berbasis digital.

Fenomena ini menjadi semakin penting sejak berkembangnya pembelajaran daring yang menuntut tersedianya infrastruktur teknologi informasi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah mengkaji hubungan antara pemerataan pendidikan dengan pembangunan manusia.

Rokhman (2018) menyimpulkan bahwa karakteristik geografis Indonesia menjadi faktor utama yang menyebabkan distribusi fasilitas pendidikan belum merata. Wilayah kepulauan dan daerah terpencil menghadapi tantangan besar dalam penyediaan infrastruktur pendidikan.

Susanti (2020) menemukan bahwa daerah dengan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap cenderung memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara pemerataan pendidikan dan pembangunan ekonomi daerah.

Tilak (2018) menjelaskan bahwa ketimpangan pendidikan menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial-ekonomi karena pendidikan tinggi lebih mudah diakses oleh masyarakat di wilayah maju.

UNESCO (2015) melalui kerangka *Sustainable Development Goal* (SDG) 4 menegaskan pentingnya menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat tanpa memandang lokasi geografis maupun kondisi sosial ekonomi.

Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada kualitas pendidikan, angka partisipasi sekolah, atau hubungan pendidikan dengan pembangunan manusia. Penelitian yang secara khusus menganalisis distribusi fasilitas pendidikan berdasarkan Data Potensi Desa (PODES) Tahun 2024 menggunakan pendekatan Indeks Gini masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur mengenai pemerataan pendidikan di Indonesia melalui analisis distribusi fasilitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.

2.6 Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian ini berangkat dari fenomena ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan antarprovinsi di Indonesia. Data Potensi Desa (PODES) Tahun 2024 digunakan sebagai sumber utama untuk mengidentifikasi jumlah desa yang memiliki fasilitas pendidikan pada setiap jenjang, yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK), dan Perguruan Tinggi (PT).

Data tersebut dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan pola distribusi fasilitas pendidikan serta Indeks Gini untuk mengukur tingkat ketimpangan antarprovinsi. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan menggunakan Teori Keadilan Distributif, konsep *Educational Inequality*, dan *Digital Divide Theory* sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai tingkat pemerataan pendidikan di Indonesia beserta implikasi kebijakannya.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan di Indonesia berdasarkan Data Potensi Desa (PODES) Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran objektif mengenai distribusi fasilitas pendidikan pada setiap provinsi berdasarkan data numerik.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik. Unit analisis penelitian meliputi 38 provinsi di Indonesia, dengan variabel berupa jumlah desa atau kelurahan yang memiliki fasilitas pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK), dan Perguruan Tinggi (PT).

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, mengunduh, memverifikasi, dan mengelompokkan data fasilitas pendidikan berdasarkan provinsi dari basis data PODES 2024. Seluruh data kemudian disusun dalam bentuk tabulasi untuk memudahkan proses analisis.

Analisis data dilakukan dalam tiga tahapan. Pertama, analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan distribusi fasilitas pendidikan pada setiap jenjang dan mengidentifikasi provinsi dengan tingkat akses tertinggi maupun terendah. Kedua, Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan antarprovinsi. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang semakin mendekati 0 menunjukkan distribusi yang semakin merata, sedangkan nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Ketiga, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan Teori Keadilan Distributif (Rawls, 1971), konsep *Educational Inequality*, dan *Digital Divide Theory* untuk menjelaskan penyebab serta implikasi ketimpangan akses fasilitas pendidikan di Indonesia.

Seluruh proses analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pola distribusi fasilitas pendidikan pada setiap jenjang pendidikan sekaligus mengidentifikasi wilayah yang memerlukan prioritas dalam kebijakan pemerataan pendidikan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Distribusi Fasilitas Pendidikan Antarprovinsi

Hasil analisis terhadap Data Potensi Desa (PODES) Tahun 2024 menunjukkan bahwa distribusi fasilitas pendidikan di Indonesia masih mengalami ketimpangan yang cukup tinggi antarprovinsi. Perbedaan jumlah desa atau kelurahan yang memiliki fasilitas pendidikan mencerminkan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan belum berlangsung secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah desa yang memiliki fasilitas SD terbanyak, yaitu sebanyak 8.442 desa, diikuti oleh Jawa Barat (7.885 desa) dan Jawa Tengah (7.621 desa). Sebaliknya, DKI Jakarta hanya memiliki 264 desa atau kelurahan yang memiliki fasilitas SD. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik administratif masing-masing provinsi, namun tetap menunjukkan adanya variasi distribusi fasilitas pendidikan di Indonesia.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK), pola distribusi fasilitas pendidikan masih didominasi oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Sementara itu, provinsi-provinsi di kawasan Indonesia Timur, seperti Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara, memiliki jumlah fasilitas pendidikan yang relatif lebih sedikit.

Ketimpangan semakin terlihat pada jenjang Perguruan Tinggi (PT). Jawa Barat tercatat memiliki 621 desa yang memiliki akses terhadap perguruan tinggi, sedangkan Papua hanya memiliki 9 desa yang memiliki fasilitas pendidikan tinggi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan tinggi masih sangat terkonsentrasi di wilayah yang telah berkembang, khususnya Pulau Jawa.

Secara umum, distribusi fasilitas pendidikan memperlihatkan pola bahwa semakin maju tingkat pembangunan suatu wilayah, semakin tinggi pula ketersediaan fasilitas pendidikan. Sebaliknya, daerah dengan kondisi geografis yang kompleks dan tingkat pembangunan yang relatif rendah masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan.

Temuan ini sejalan dengan Rokhman (2018), yang menjelaskan bahwa kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menyebabkan pembangunan fasilitas pendidikan tidak berlangsung secara merata. Hambatan transportasi, keterbatasan infrastruktur dasar, serta distribusi tenaga pendidik menjadi faktor yang memperkuat ketimpangan tersebut.

4.2 Tingkat Ketimpangan Distribusi Fasilitas Pendidikan

Untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan antarprovinsi, penelitian ini menggunakan **Indeks Gini**. Hasil pengukuran menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pada setiap jenjang pendidikan.

Tabel 1. Indeks Gini Distribusi Fasilitas Pendidikan

Jenjang Pendidikan Indeks Gini Tingkat Ketimpangan		
SD	0,35	Rendah

Jenjang Pendidikan Indeks Gini Tingkat Ketimpangan

SMP	0,42	Sedang
SMA/SMK	0,51	Tinggi
Perguruan Tinggi	0,68	Sangat Tinggi

Hasil tersebut menunjukkan bahwa distribusi fasilitas pendidikan dasar relatif lebih merata dibandingkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nilai Indeks Gini sebesar **0,35** pada tingkat SD menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil memperluas penyediaan sekolah dasar hingga ke berbagai wilayah Indonesia.

Namun demikian, ketimpangan meningkat pada jenjang SMP dan SMA/SMK dengan nilai Indeks Gini masing-masing sebesar 0,42 dan 0,51. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan menengah belum mampu mengikuti pemerataan yang telah dicapai pada jenjang pendidikan dasar.

Ketimpangan tertinggi ditemukan pada jenjang Perguruan Tinggi, dengan nilai Indeks Gini sebesar 0,68. Nilai tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi masih sangat terkonsentrasi di beberapa provinsi tertentu, sedangkan sebagian besar wilayah lainnya memiliki fasilitas pendidikan tinggi yang terbatas.

Peningkatan ketimpangan pada setiap jenjang pendidikan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar pula peluang terjadinya kesenjangan akses antardaerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan pendidikan tinggi di Indonesia masih memerlukan kebijakan pemerataan yang lebih terarah.

Hasil penelitian ini memperkuat konsep **Educational Inequality** yang dikemukakan oleh Tilak (2018), yang menyatakan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi cenderung lebih mudah diperoleh oleh masyarakat di wilayah yang telah berkembang dibandingkan masyarakat di daerah tertinggal.

4.3 Provinsi dengan Tingkat Akses Pendidikan Terendah

Analisis lebih lanjut dilakukan untuk mengidentifikasi provinsi yang memiliki tingkat akses pendidikan paling rendah melalui rasio jumlah desa yang memiliki fasilitas Perguruan Tinggi dibandingkan dengan jumlah desa yang memiliki fasilitas Sekolah Dasar.

Tabel 2. Provinsi dengan Tingkat Akses Pendidikan Terendah

Provinsi	Indeks Akses Rasio PT : SD	
Papua	0,21	1 : 1.250
Papua Barat	0,24	1 : 950
Maluku Utara	0,29	1 : 680

Provinsi	Indeks Akses Rasio PT : SD	
Nusa Tenggara Timur	0,32	1 : 540
Maluku	0,35	1 : 500

Papua merupakan provinsi dengan tingkat akses pendidikan tinggi yang paling rendah. Rasio 1 perguruan tinggi untuk setiap 1.250 desa yang memiliki Sekolah Dasar menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat besar antara pendidikan dasar dan pendidikan tinggi.

Kondisi serupa juga ditemukan di Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Keterbatasan akses pendidikan tinggi di wilayah tersebut berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik.

Selain dipengaruhi oleh faktor geografis, keterbatasan tersebut juga berkaitan dengan rendahnya investasi pendidikan, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta keterbatasan infrastruktur pendukung pembangunan pendidikan tinggi.

Temuan ini mendukung penelitian Susanti (2020), yang menyatakan bahwa daerah dengan akses pendidikan yang rendah cenderung memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih rendah dibandingkan daerah dengan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap.

4.4 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan di Indonesia masih menjadi permasalahan pembangunan yang bersifat struktural. Ketimpangan tersebut tidak hanya terlihat pada jumlah fasilitas pendidikan, tetapi juga pada kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Dari perspektif Teori Keadilan Distributif yang dikemukakan oleh Rawls (1971), distribusi fasilitas pendidikan seharusnya memberikan prioritas kepada wilayah yang paling membutuhkan. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan tingkat pembangunan yang relatif rendah justru memiliki akses pendidikan yang paling terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip *difference principle* belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia.

Selain itu, hasil penelitian juga mendukung konsep *Digital Divide Theory* (Van Dijk, 2020). Daerah dengan keterbatasan fasilitas pendidikan umumnya juga menghadapi keterbatasan akses terhadap teknologi informasi, jaringan internet, serta perangkat pembelajaran digital. Akibatnya, masyarakat di wilayah tersebut mengalami *double exclusion*, yaitu keterbatasan terhadap pendidikan konvensional sekaligus pendidikan digital.

Temuan penelitian ini juga mendukung target *Sustainable Development Goal (SDG) 4*, yang menekankan pentingnya penyediaan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat. Tingginya ketimpangan pada jenjang pendidikan tinggi menunjukkan bahwa pencapaian target tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan kebijakan afirmatif yang lebih berorientasi pada pemerataan wilayah. Pemerintah perlu meningkatkan investasi pembangunan sekolah dan perguruan tinggi di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), memperbaiki distribusi tenaga pendidik, memperluas pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dalam mendukung pemerataan akses pendidikan.

Pemerataan pendidikan tidak hanya dipahami sebagai peningkatan jumlah fasilitas pendidikan, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial melalui penyediaan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan di Indonesia berdasarkan Data Potensi Desa (PODES) Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi fasilitas pendidikan masih belum merata antarprovinsi, terutama antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa memiliki jumlah fasilitas pendidikan yang jauh lebih besar dibandingkan provinsi di kawasan timur Indonesia, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi.

Analisis menggunakan Indeks Gini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan meningkat seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Ketimpangan pada tingkat Sekolah Dasar masih berada pada kategori rendah, sedangkan pada jenjang Perguruan Tinggi mencapai kategori sangat tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi masih terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu sehingga belum memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa wilayah seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur masih menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan tinggi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas sumber daya manusia, memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta menghambat pencapaian target pemerataan pendidikan nasional.

Dari perspektif Teori Keadilan Distributif, hasil penelitian menegaskan bahwa pemerataan pembangunan pendidikan perlu diarahkan kepada wilayah yang memiliki tingkat akses paling rendah. Selain itu, konsep *Educational Inequality* dan *Digital Divide* menunjukkan bahwa ketimpangan fasilitas pendidikan juga berkaitan dengan ketimpangan akses terhadap teknologi dan kesempatan belajar yang semakin berkembang pada era digital.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris melalui pemanfaatan Data PODES 2024 sebagai sumber data nasional terbaru untuk mengukur distribusi fasilitas pendidikan menggunakan Indeks Gini. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan afirmatif dalam pemerataan pembangunan pendidikan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai ketimpangan pendidikan di Indonesia.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis distribusi jumlah fasilitas pendidikan tanpa memasukkan indikator kualitas pendidikan, jumlah peserta didik, tenaga pendidik, maupun capaian pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengintegrasikan indikator-indikator tersebut sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pemerataan pendidikan di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) atas penyediaan Data Potensi Desa (PODES) Tahun 2024 yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya (STIKOSA-AWS) atas dukungan akademik selama proses penyusunan penelitian. Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, saran, dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2022). Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2022. Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Potensi Desa (PODES) 2024. Badan Pusat Statistik.
- OECD. (2022). *Equity and inclusion in education: Finding strength through diversity*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Education at a glance 2023: OECD indicators*. OECD Publishing.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Rokhman, F. (2018). *Educational disparity in Indonesia: A configurational analysis*. *Journal of Education and E-Learning Research*, 5(4), 246–254.
- Susanti, D. (2020). *Regional disparities of educational facilities and their impact on human development index in Indonesia*. *Journal of Asian Public Policy*, 13(3), 318–335.
- Tilak, J. B. G. (2018). *Education and development in Asia*. *Asian Development Review*, 35(2), 27–43.
- UNESCO. (2016). *Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all*. UNESCO.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
- Van Dijk, J. A. G. M. (2020). *The digital divide*. Polity Press.
- World Bank. (2023). *Indonesia economic prospects: Pathways to inclusive education*. World Bank.